

## ABSTRAK

**Muhamad Iqbal Ansori Firdaus** : “Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023.”

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, sistem informasi data pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Ada tiga isu yang krusial di dalam suatu sistem pendaftaran pemilih, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme dan efektivitas implementasi pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Provinsi Jawa Barat melalui sistem informasi data pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024 dihubungkan dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi, teori tujuan hukum, teori pengawasan, teori kepemiluan dan teori sistem informasi. Teori ini digunakan untuk dijadikan sebagai suatu analisis dan menjadi sebuah landasan atau dasar penelitian dari pengaturan, mekanisme dan efektivitas implementasi pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang diintegrasikan melalui sistem informasi data pemilih.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, dan menggunakan teknik pengumpulan data secara primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti dan data sekunder yang diperoleh melalui dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis *de jure*, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih sesuai peraturan peundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Majalengka, Subang dan Purwakarta sangat mencermati hasil rekapitulasi dan penetapan DPS dan/atau hasil rekapitulasi dan penetapan DPT dengan sidalih serta telah memastikan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih melalui sidalih tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih WNI. Selanjutnya terdapat beberapa kendala seperti akses sidalih yang terbatas, data ganda masih ditemukan dalam daftar pemilih serta jaringan yang lambat dan sistem galat atau *error system* sehingga proses rekapitulasi mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan serta menghambat akurasi dan pencatatan rekapitulasi.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Pemilu, Sistem Informasi Data Pemilih*

## ABSTRACT

**Muhamad Iqbal Ansori Firdaus:** "Implementation of Supervision of Data Updates and Compilation of Voter Lists through the Voter Data Information System (SIDALIH) in the 2024 General Election in West Java Province is linked to Perbawaslu Number 4 of 2023."

Updating data and compiling voter lists is one of the important things to guarantee citizens' voting rights in general elections. The right to vote is a basic citizen's right guaranteed by the 1945 Constitution and is one of the human rights that must be protected. Therefore, a voter data information system must be created based on comprehensive, accurate and up-to-date principles. There are three crucial issues in a voter registration system, namely who is included in the voter list, who carries out voter registration, and whether voter registration is a right or an obligation.

This research aims to analyze the arrangements, mechanisms and effectiveness of the implementation of supervision of data updating and preparation of voter lists in West Java Province through the voter data information system in the 2024 General Election linked to Perbawaslu Number 4 of 2023 concerning supervision of data updating and preparation of voter lists in general elections.

The theories used in this research are democratic theory, legal objective theory, supervision theory, electoral theory and information systems theory. This theory is used to serve as an analysis and become a foundation or basis for research on the arrangements, mechanisms and effectiveness of the implementation of monitoring data updates and the preparation of voter lists which are integrated through a voter data information system.

This research was conducted using a descriptive analytical method with an empirical juridical approach, and used primary data collection techniques obtained directly from the first source, from parties involved with the object under study and secondary data obtained through library research, by collecting from various reading sources related to the problem under study. The data collection techniques used in this research were collected in three ways, namely: interviews, observation and literature study.

The results of this research show that the process of updating and compiling the voter list is carried out on a *de jure* basis, meaning that they are registered as voters according to the data on each voter's population document in accordance with statutory regulations. Bawaslu for Majalengka, Subang and Purwakarta Regency is closely monitoring the results of the recapitulation and determination of the DPS and/or the results of the recapitulation and determination of the DPT with *sidalih* and has ensured that the process of updating data and compiling voter lists through *sidalih* does not eliminate and/or harm Indonesian citizens' voting rights. Furthermore, there are several obstacles such as limited access to *sidalih*, duplicate data is still found in the voter list as well as slow networks and system errors so that the recapitulation process is delayed from the set schedule and hampers the accuracy and recording of the recapitulation.

**Keywords:** *Supervision, Election, Voter Data Information System*